

Judul : Evaluasi transportasi, DPR minta terapkan prinsip zero accident
Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Evaluasi Transportasi DPR Minta Terapkan Prinsip Zero Accident

SUMBER IC PROBAD



Edi Purwanto

ANGGOTA Komisi V DPR Edi Purwanto menilai jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di Pangkep, Sulawesi Selatan, sebagai peringatan keras bagi sistem transportasi nasional. Karena itu, evaluasi tidak boleh terbatas pada sektor udara semata, melainkan harus menyentuh keseluruhan moda.

Menurut Edi, pendekatan sektoral justru mempersempit akar persoalan keselamatan publik yang bersifat sistemik. Negara harus berani membenahi tata kelola transportasi secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terus berulang dengan pola yang sama.

"Kami mendorong Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya pada sektor transportasi udara, tapi juga transportasi laut dan darat," kata Edi dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Edi menegaskan, tiap kecelakaan transportasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai gangguan teknis. Setiap insiden harus dimaknai sebagai sinyal bahaya bagi negara untuk memperkuat sistem keselamatan nasional secara berkelanjutan.

"Insiden harus jadi peringatan serius agar negara memperkuat komitmen terhadap prinsip *zero accident* sebagai fondasi utama penyelenggaraan transportasi nasional," ujar politikus PDIP itu.

Untuk penanganan di lokasi kejadian pesawat IAT yang jatuh, dia meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat dan maksimal. Percepat proses evakuasi korban oleh tim SAR dan unsur teknis agar aspek kemanusiaan tidak terabaikan. "Keselamatan dan kemanusiaan harus jadi prioritas utama. Harapan kita bersama, seluruh korban dapat segera ditemukan," ucapnya.

Anggota Komisi V DPR Syafiuddin menambahkan, insiden itu harus jadi momentum evaluasi serius sektor penerbangan nasional. Negara tidak boleh bersikap reaktif semata, melainkan membangun sistem pencegahan yang kuat dan terukur.

"Harus ada perbaikan-perbaikan terhadap leading sektornya, baik Kemhub, atau lembaga yang lain. Ke depan, harus ada langkah antisipatif guna mencegah terjadinya insiden serupa," kata Syafiuddin di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti peran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang harus lebih proaktif dalam mitigasi cuaca ekstrem. Integrasikan informasi cuaca dalam pengambilan keputusan operasional penerbangan agar risiko dapat ditekan sejak dini.

"Koordinasi antar sektor ini penting sebagai mitigasi, apalagi dalam lingkup penerbangan dan di tengah cuaca ekstrem yang kerap menjadi tantangan dunia aviasi," jelas legislator Fraksi PKB itu. ■ PVB